

RENCANA AKSI
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	SATUAN	TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	KETERANGAN
I.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	94,9	Angka	-	-	-	94,9	
	1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,53	Angka	-	-	-	4,53	
	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik								
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	12	Dokumen	3	6	9	12	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	3	6	9	12	
	2. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Yang dilaksanakan	16	Jenis	16	16	16	16	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	3	6	9	12	
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas lembaga lembaga dan forum Kemasyarakatan	16	Kegiatan	4	8	12	16	
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	Lembaga Kemasyarakatan	7	0	0	7	

	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	3	6	9	12	
	3. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum								
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umumn	12	Kegiatan	3	6	9	12	
	1. Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	3	6	9	12	
	2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Laporan	3	6	9	12	
	4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum								
	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Potensi konflik	12	Dokumen	3	6	9	12	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	Jumah Kegiatan Pembinaan persatuan dan Kesaruan bangsa	4	Kegiatan	-	-	4	4	
	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	Dokumen	4	8	12	16	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	Dokumen	4	8	12	16	

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan Bobotsari	Nilai Sakip Kecamatan	68,25	Angka	-	-	-	68,25	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota								
	1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1	Dokumen	1	1	1	1	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	1	1	1	
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	1	2	3	6	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8	orang	8	8	8	8	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8	orang	8	8	8	8	
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150	Dokumen	35	70	110	150	
	3. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	3	6	9	12	
	3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Dokumen	3	6	9	12	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	3	6	9	12	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi umum penunjang operasional kantor	12	Bulan	3	6	9	12	

	1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	6	9	12	
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	3	6	9	12	
	3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	3	6	9	12	
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3	6	9	12	
	5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	3	6	9	12	
	5. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	-	20	20	20	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	-	20	20	20	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Laporan	3	6	9	12	
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	3	6	9	12	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	3	6	9	12	
	3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3	6	9	12	
	7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	3	5	8	11	
	1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	3	5	8	11	

	2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	3	8	12	15	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	-	-	1	1	

Bobotsari, 28 Januari 2026



 CAMAT BOBOTSARI
 BORIS MULYANTO, S.Ag
 Pembina
 NIP. 197610102010011002